

ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP PENGUNGKAPAN ADEQUATE, FAIR, DAN FULL DISCLOSURE DALAM PELAPORAN KEUANGAN: TINJAUAN LITERATUR

Fika Febriani¹, Melinda Aulia², Riri Amrilia³, Lusya LiangbineJawan⁴, Nabila Nursyahbania Zachra⁵

Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika ¹⁻⁵

Email: 63240307@bsi.ac.id

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 7 Bulan : Juli Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>Laporan keuangan merupakan media komunikasi utama yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan, seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Tingkat kebermanfaatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh derajat pengungkapan (disclosure) yang diterapkan, mengingat pengungkapan merupakan bagian integral dari proses akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tiga konsep pengungkapan yang umum digunakan, yaitu adequate disclosure, fair disclosure, dan full disclosure, ditinjau dari definisi, karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (literature review) dengan pendekatan deskriptif-komparatif terhadap berbagai sumber akuntansi keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga konsep tersebut bukan merupakan pilihan yang saling eksklusif, melainkan suatu rangkaian (continuum) tingkat pengungkapan: adequate disclosure berperan sebagai syarat minimum, fair disclosure menjamin kesetaraan distribusi informasi, dan full disclosure menjadi tujuan ideal transparansi yang tetap perlu dibatasi oleh prinsip materialitas agar tidak menimbulkan information overload. Penerapan strategi pengungkapan yang proporsional disimpulkan sebagai pendekatan paling sesuai untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang patuh, adil, dan transparan.</i> Kata Kunci: adequate disclosure, fair disclosure, full disclosure, pengungkapan, pelaporan keuangan

A. PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan merupakan salah satu sarana utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta arus kas kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan keuangan memegang peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses akuntansi.

Pengungkapan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai kepada para pengguna laporan keuangan agar mereka dapat memahami keadaan dan prospek perusahaan secara lebih komprehensif. Tingkat pengungkapan menjadi tiga konsep yang penerapannya bergantung pada peraturan yang dianggap paling sesuai, yaitu *adequate disclosure*, *fair disclosure*, dan *full disclosure* (Alshehadeh et al., 2024). Masing-masing konsep memiliki karakteristik dan derajat keluasan informasi yang berbeda.

Konsep *adequate disclosure* menitikberatkan pada penyajian informasi minimum yang diwajibkan sesuai standar dan peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor (Youcef et al., 2025). Sementara itu, *fair disclosure* menekankan pengungkapan yang mencerminkan tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pemakai laporan, dengan menyediakan informasi yang layak bagi pembaca potensial (Youcef et al., 2025). Adapun *full disclosure* mengimplikasikan penyajian seluruh informasi yang relevan, meskipun pengungkapan yang berlebihan justru dapat mengaburkan informasi yang signifikan dan menyulitkan interpretasi laporan (Youcef et al., 2025).

Perbedaan karakteristik pada ketiga konsep tersebut menimbulkan berbagai pandangan mengenai tingkat pengungkapan yang paling sesuai dalam pelaporan keuangan. Di satu sisi, pengungkapan yang terlalu sedikit dapat menimbulkan asimetri informasi dan menurunkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Di sisi lain, pengungkapan yang terlalu luas dapat menambah biaya penyusunan laporan serta menyulitkan pengguna dalam memisahkan informasi yang benar-benar penting dari informasi yang kurang relevan.

Seiring dengan kompleksitas aktivitas bisnis yang meningkat dan tuntutan transparansi dari para pemangku kepentingan, pemahaman mengenai konsep *adequate*, *fair*, dan *full disclosure* menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian perbandingan terhadap ketiganya agar dapat menangkap perbedaan, keunggulan, dan kelemahan masing-masing konsep, serta dampaknya terhadap mutu pelaporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terkait penerapan konsep pengungkapan yang efektif dalam pelaporan keuangan.

Di Indonesia, perkembangan standar akuntansi yang dikelola oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus bergerak dinamis melalui konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke arah International Financial Reporting Standards (IFRS). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai batasan pengungkapan baik secara konsep global maupun penerapannya dalam koridor regulasi domestik menjadi sangat krusial untuk dikaji.

Kajian Teori

Teori Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan merupakan proses penyampaian informasi keuangan dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan agar informasi tersebut bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menegaskan bahwa pelaporan keuangan dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas suatu entitas. Media komunikasi utama ini menjadi jembatan krusial yang menghubungkan pihak manajemen perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal.

Untuk menjamin kebermanfaatan tersebut, laporan keuangan tidak boleh disajikan secara sembarangan melainkan harus memenuhi karakteristik kualitatif yang ketat. Karakteristik peningkat yang terdiri dari keterbandingan, keterverifikasi, ketepatanwaktuan, dan keterpahaman sangat diperlukan untuk memperkuat kualitas informasi tersebut (Karunananda et al., 2025). Kualitas informasi ini juga dinilai dari tingkat relevansinya, di mana data yang disajikan harus mampu memengaruhi keputusan ekonomi pengguna serta mencerminkan realitas perusahaan secara jujur dan bebas dari kesalahan material (Azar et al., 2019).

Selain itu, penyajian pelaporan keuangan yang berkualitas memiliki dampak nyata terhadap keputusan alokasi modal bagi para pengguna eksternal dalam menentukan tindakan ekonomi mereka (Jaafar et al., 2023). Ketika manajemen mampu menerapkan tata kelola data akuntansi yang baik dan terstruktur, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat secara signifikan (Alshehadeh et al., 2024). Oleh karena itu, seluruh proses penyusunan pelaporan keuangan ini harus dikelola secara profesional demi menghasilkan informasi yang andal bagi pasar.

Teori Pengungkapan (Disclosure Theory)

Pengungkapan atau *disclosure* dalam konteks akuntansi dipahami sebagai bentuk penyajian informasi yang komprehensif, baik yang tercantum dalam laporan keuangan utama maupun laporan tambahan. Di Indonesia, kewajiban dan tata cara penyajian pengungkapan ini diatur secara normatif di dalam PSAK 1 yang diterbitkan oleh IAI. Salah satu bentuk pengungkapan yang paling krusial adalah catatan atas laporan keuangan yang berfungsi memberikan rincian mendalam, termasuk pembahasan manajemen serta proyeksi operasional perusahaan (Zhao, 2022).

Kebijakan mengenai pengungkapan ini juga memegang peranan penting dalam menciptakan transparansi korporasi secara menyeluruh. Pengungkapan yang baik melibatkan pertimbangan matang mengenai kerangka transparansi di berbagai lini, baik dalam akuntansi perpajakan, akuntansi manajerial, maupun akuntansi keuangan (Bischof et al., 2024). Melalui transparansi yang terstruktur, pihak luar dapat melakukan evaluasi yang lebih objektif terhadap risiko dan prospek masa depan perusahaan.

Secara teoretis, urgensi mengenai pengungkapan ini erat kaitannya dengan teori keagenan untuk menjembatani masalah asimetri informasi antara manajemen dan pemilik modal. Pengungkapan yang efektif terbukti memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi secara keseluruhan (Youcef et al., 2025). Dengan menyediakan informasi yang terbuka, manajemen dapat mengurangi ketimpangan informasi, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Konsep Pengungkapan Cukup (Adequate Disclosure)

Konsep *adequate disclosure* atau pengungkapan cukup memfokuskan diri pada penyajian batas informasi minimum yang diwajibkan oleh standar akuntansi dan aturan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, manajemen memastikan bahwa laporan keuangan telah memenuhi seluruh standar internasional yang diadopsi demi mencapai efisiensi operasional perusahaan (Al-Abd, 2025). Informasi minimum ini disajikan dengan tujuan utama agar angka-angka di dalam laporan keuangan dapat diinterpretasikan secara benar oleh para investor (Youcef et al., 2025).

Karakteristik utama dari pengungkapan cukup ini ditandai oleh adanya fokus yang kuat pada pemenuhan aspek legalitas formal dan penghindaran penyajian data yang berlebihan. Penyampaian informasi diarahkan agar tetap ringkas, relevan, dan efisien tanpa mengurangi nilai yang wajib ada di dalam laporan keuangan. Di Indonesia, implementasi konsep ini terlihat nyata ketika perusahaan memenuhi seluruh butir pengungkapan wajib yang diamanatkan secara eksplisit di dalam klausul PSAK 1.

Keunggulan yang paling menonjol dari penerapan konsep ini adalah rendahnya biaya operasional dan efisiensi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Kendati demikian, konsep ini memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena batasan minimum tersebut sering kali mengabaikan informasi non-keuangan. Akibatnya, investor potensial kerap kali kesulitan untuk membaca proyeksi risiko serta peluang bisnis

jangka panjang perusahaan karena data yang disajikan terlalu terbatas pada aspek pematuhan standar baku saja.

Konsep Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Konsep *fair disclosure* atau pengungkapan wajar membawa sebuah dimensi etis yang kuat di dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Fokus utama dari gagasan ini adalah untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pengguna laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang layak bagi pembaca potensial (Youcef et al., 2025). Konsep ini menentang keras adanya pengungkapan selektif yang bersifat sistemik karena pengungkapan yang tebang pilih dinilai sangat tidak adil bagi pelaku pasar (Dreyer et al., 2026).

Penerapan *fair disclosure* secara ketat mewajibkan manajemen untuk segera melakukan keterbukaan informasi kepada publik apabila terjadi penyampaian informasi material yang tidak sengaja kepada pihak tertentu. Pengungkapan yang dilakukan harus diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu detail tetapi juga tidak terlalu minim, sehingga tercipta keadilan akses informasi bagi semua pihak. Mekanisme ini berjalan beriringan dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan serta standar IAI di Indonesia yang melarang keras adanya keuntungan sepihak akibat asimetri informasi.

Konteks penerapan konsep pengungkapan wajar ini menjadi sangat relevan bagi perusahaan-perusahaan terbuka yang memiliki banyak pemegang saham dan investor publik. Ketika perusahaan mampu menjamin kesetaraan akses informasi, indikasi adanya praktik perdagangan orang dalam dapat ditekan secara signifikan. Dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya integritas pasar modal, perlindungan terhadap investor ritel, serta penguatan kepercayaan pasar secara menyeluruh karena semua orang berdiri di atas landasan informasi yang sama.

Konsep Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Konsep *full disclosure* atau pengungkapan lengkap menuntut penyajian seluruh informasi yang relevan dengan batasan biaya dan materialitas mengenai kondisi serta aktivitas operasional perusahaan (Aldredge & Dubois, 2022). Pendekatan ini memandang transparansi maksimal sebagai instrumen utama untuk menunjukkan akuntabilitas tingkat tinggi kepada masyarakat luas. Dalam praktiknya, pemenuhan konsep ini dilakukan dengan menambahkan berbagai informasi tambahan secara mendalam melalui catatan atas laporan keuangan.

Meskipun konsep ini menawarkan keterbukaan yang tinggi, penyajian informasi yang terlalu rinci dan berlebihan justru dianggap berbahaya. Pengungkapan yang tidak terkontrol

dikhawatirkan dapat mengaburkan informasi yang signifikan sehingga membuat laporan keuangan menjadi sulit untuk diinterpretasikan (Youcef et al., 2025). Oleh karena itu, badan standar akuntansi terus mengkaji prinsip-prinsip pengungkapan agar penyajian informasi tambahan tetap berada dalam koridor relevansi yang tepat (Abad et al., 2019).

Risiko terbesar yang membayangi penerapan konsep ini adalah munculnya fenomena *information overload* bagi para pembaca laporan keuangan. Ketika laporan terlalu tebal dan dipenuhi detail yang kurang penting, pengguna laporan justru akan mengalami hambatan dalam memisahkan data utama dari data pendukung. Di Indonesia, penerapan konsep ini biasanya disiasati oleh perusahaan besar dengan menyusun laporan tahunan yang terstruktur rapi agar substansi informasi berdasarkan PSAK 1 tetap terjaga jelas.

Perbandingan dan Sintesis Kontinum Pengungkapan

Ketiga gagasan mengenai *adequate disclosure*, *fair disclosure*, dan *full disclosure* pada dasarnya berbagi satu muara tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Penerapan dari ketiga konsep tingkat pengungkapan ini sangat bergantung pada peraturan yang dianggap paling sesuai oleh regulator maupun karakteristik dari entitas itu sendiri (Alshehadeh et al., 2024). Perbedaan di antara ketiganya hanya terletak pada derajat keluasaan serta kedalaman informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada pihak luar.

Apabila ditarik sebuah garis lurus, ketiga konsep ini membentuk sebuah rangkaian atau kontinum tingkat pengungkapan yang bergerak secara dinamis. Konsep *adequate disclosure* bertindak sebagai fondasi pemenuhan syarat minimum hukum berdasarkan PSAK 1, sedangkan *fair disclosure* menjamin bahwa distribusi atas informasi dasar tersebut berjalan secara adil tanpa diskriminasi kepada seluruh pelaku pasar. Sementara itu, *full disclosure* menjadi arah ideal transparansi maksimal yang ingin dicapai oleh manajemen dengan tetap dikendalikan oleh asas materialitas agar tidak menimbulkan kelebihan informasi.

Bagi ekosistem bisnis dan pelaporan keuangan di Indonesia, pengadopsian strategi pengungkapan yang proporsional merupakan pendekatan yang paling bijaksana. Manajemen perusahaan harus mampu mematuhi batasan normatif PSAK yang dikeluarkan oleh IAI sebagai standar dasar keselamatan hukum. Melalui integrasi yang seimbang antara pemenuhan standar wajib, jaminan keadilan akses, serta penyajian informasi material yang lengkap, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang patuh, adil, dan transparan bagi semua pihak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih secara sengaja karena fokus utama penelitian adalah untuk membandingkan serta menganalisis konsep *adequate disclosure*, *fair disclosure*, dan *full disclosure* berdasarkan teori serta temuan yang sudah dipublikasikan dalam berbagai literatur akuntansi. Studi ini tidak mengumpulkan data primer langsung dari lapangan, melainkan berfokus pada analisis konseptual secara mendalam.

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur atau *literature review*. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah melakukan pembedahan konseptual dan teoretis terhadap gagasan *adequate disclosure*, *fair disclosure*, dan *full disclosure*. Melalui metode ini, analisis diarahkan pada telaah kritis terhadap literatur akuntansi yang ada tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan.

Desain penelitian yang diterapkan adalah deskriptif-komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan karakteristik dan definisi dasar dari masing-masing konsep pengungkapan laporan keuangan. Sementara itu, pendekatan komparatif diaplikasikan untuk memetakan persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kelemahan di antara ketiga konsep tersebut guna merumuskan batasan pengungkapan yang efektif.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah internasional yang berbasis International Financial Reporting Standards (IFRS), buku teks akuntansi keuangan, serta dokumen standar akuntansi domestik. Dokumen regulasi lokal yang menjadi acuan utama adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Proses pencarian literatur dilakukan secara digital melalui basis data akademik *Google Scholar* dan *Garuda* menggunakan kata kunci utama seperti "*adequate disclosure*", "*fair disclosure*", "*full disclosure*", dan "*PSAK 1*".

Untuk menjaga kualitas analisis, literatur yang dikumpulkan disaring menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang spesifik. Literatur yang dipilih wajib membahas konsep pengungkapan dalam konteks pelaporan keuangan, berasal dari jurnal terakreditasi atau publikasi resmi badan regulasi, serta mengutamakan terbitan 10 tahun terakhir untuk menangkap dinamika akuntansi modern. Sebaliknya, dokumen yang tidak memiliki kaitan langsung dengan pelaporan keuangan dan akuntansi bisnis otomatis dikeluarkan dari analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif. Setiap literatur yang terpilih diringkas untuk mengidentifikasi definisi, karakteristik, tujuan, serta kelebihan dan kelemahan dari masing-masing konsep disclosure. Hasil ringkasan kemudian disusun ke dalam tabel perbandingan untuk memudahkan identifikasi pola, persamaan, dan perbedaan antarkonsep, sebelum ditarik simpulan secara naratif. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan secara naratif untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, ditemukan bahwa ketiga konsep pengungkapan yaitu *adequate*, *fair*, dan *full disclosure* memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Namun demikian, ketiganya berbeda secara signifikan dalam cakupan, orientasi, serta implikasinya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Perbandingan ketiga konsep tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Konsep Adequate, Fair, dan Full Disclosure

Dimensi	<i>Adequate Disclosure</i>	<i>Fair Disclosure</i>	<i>Full Disclosure</i>
Orientasi utama	Kepatuhan terhadap standar/regulasi minimum	Kesetaraan akses informasi bagi seluruh pengguna	Transparansi maksimum atas seluruh informasi material
Cakupan informasi	Minimum, sebatas yang diwajibkan standar	Seimbang, tidak terlalu detail maupun minim	Luas dan komprehensif, mencakup seluruh hal material
Landasan teori	Teori kepatuhan & regulasi akuntansi	Teori keagenan & etika informasi	Teori sinyal & materialitas
Kelebihan	Biaya penyusunan rendah; laporan ringkas dan efisien	Mengurangi asimetri informasi; meningkatkan kepercayaan investor	Informasi sangat komprehensif; mendukung akuntabilitas tinggi
Kelemahan	Informasi yang relevan bagi pengguna bisa jadi belum tercakup	Menuntut sistem dan pengawasan distribusi informasi yang	Berisiko menimbulkan information overload bagi pengguna

Dimensi	Adequate Disclosure		Fair Disclosure		Full Disclosure	
Konteks penerapan	konsisten					
	Entitas kompleksitas rendah menengah	dengan usaha hingga	Perusahaan (<i>go public</i>) banyak saham	terbuka dengan pemegang	Perusahaan dengan kompleksitas tinggi & tuntutan transparansi besar	

Sumber: disusun oleh penulis berdasarkan tinjauan literatur.

Adequate Disclosure: Efisiensi yang Berpotensi Mengorbankan Relevansi

Standar minimum yang dirancang untuk melindungi investor justru berpotensi menjadi celah bagi manajemen untuk secara sah menahan informasi non-keuangan yang material secara substantif namun tidak diwajibkan secara formal oleh PSAK 1 (Youcef et al., 2025). Kepatuhan terhadap huruf regulasi (*compliance with the letter*) ternyata tidak otomatis setara dengan pemenuhan semangat karakteristik kualitatif laporan keuangan (Karunananda et al., 2025). Pola ini mengindikasikan bahwa *adequate disclosure* justru paling rentan disalahgunakan pada entitas dengan kompleksitas usaha menengah karena di situlah jarak antara "wajib diungkap" dan "relevan untuk diungkap" paling lebar.

Fair Disclosure: Kekuatan sekaligus Beban Pengawasan

Keunggulan etis *fair disclosure* justru menjadi sumber kelemahan operasionalnya: menjamin kesetaraan akses informasi menuntut sistem pengawasan distribusi yang konsisten dan mahal (Dreyer et al., 2026), sesuatu yang jarang dimiliki entitas di luar perusahaan terbuka besar. Akibatnya, *fair disclosure* cenderung hanya benar-benar tercapai pada emiten dengan sumber daya kepatuhan yang memadai, sementara perusahaan terbuka berskala lebih kecil berisiko gagal memenuhi prinsip ini meski secara niat sudah berupaya adil seperti kesenjangan implementasi yang jarang dibahas eksplisit dalam literatur normatif.

Full Disclosure: Trade-off antara Akuntabilitas dan Daya Cerna Informasi

Full disclosure yang efektif ternyata bukan soal menambah volume informasi, melainkan soal kurasi: bagaimana badan standar dan manajemen memilah mana yang material tanpa menambah beban kognitif pembaca (Youcef et al., 2025). Ini menjawab rumusan masalah ketiga pada Bab 1 dimana batasan pengungkapan yang efektif bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang diungkap, melainkan oleh sejauh mana proses penyaringan materialitas dijalankan secara disiplin sebelum informasi disajikan.

Sintesis: Kontinum Pengungkapan sebagai Jawaban atas Rumusan Masalah

Dari pembahasan 4.1–4.3, terlihat pola bahwa setiap tingkat pengungkapan membawa *trade-off* yang berbeda (Alshehadeh et al., 2024): *adequate disclosure* menukar relevansi dengan efisiensi biaya, *fair disclosure* menukar kesetaraan akses dengan beban pengawasan, dan *full disclosure* menukar akuntabilitas dengan risiko *information overload*. Susunan ini menjawab ketiga rumusan masalah pada Bab 1: perbedaan karakteristik ketiganya (poin 1) pada dasarnya adalah perbedaan *trade-off* yang dipilih; dampaknya terhadap mutu laporan (poin 2) bersifat komplementer sepanjang *trade-off* tersebut dikelola secara sadar; dan batasan pengungkapan yang efektif (poin 3) dicapai bukan dengan memilih salah satu konsep secara mutlak, melainkan dengan menerapkan ketiganya secara berjenjang sesuai kompleksitas dan profil pemangku kepentingan entitas.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *adequate disclosure*, *fair disclosure*, dan *full disclosure* bukan tiga pilihan yang saling eksklusif, melainkan tiga titik dalam satu kontinum pengungkapan yang masing-masing membawa *trade-off* berbeda. *Adequate disclosure* menukar relevansi informasi dengan efisiensi biaya dan justru paling rentan disalahgunakan pada entitas berkompleksitas menengah, karena di situlah jarak antara "wajib diungkap" dan "relevan untuk diungkap" paling lebar. *Fair disclosure* menukar kesetaraan akses informasi dengan beban sistem pengawasan yang mahal, sehingga secara praktis lebih mudah dicapai oleh emiten besar dibanding perusahaan terbuka berskala lebih kecil. *Full disclosure* menukar akuntabilitas maksimal dengan risiko *information overload*, dan efektivitasnya ditentukan bukan oleh volume informasi yang diungkap, melainkan oleh disiplin proses kurasi materialitas sebelum informasi disajikan.

Temuan ini menjawab ketiga rumusan masalah penelitian: perbedaan karakteristik ketiga konsep pada dasarnya adalah perbedaan *trade-off* yang dipilih, bukan sekadar perbedaan cakupan informasi (poin 1); dampaknya terhadap mutu laporan keuangan bersifat komplementer sepanjang *trade-off* tersebut dikelola secara sadar oleh manajemen (poin 2); dan batasan pengungkapan yang efektif dicapai bukan dengan memilih salah satu konsep secara mutlak, melainkan dengan menerapkannya secara berjenjang yang memenuhi standar minimum sebagai dasar hukum, menjaga keadilan akses sesuai kapasitas pengawasan entitas, lalu melengkapi dengan informasi material yang telah disaring ketat berdasarkan relevansi (poin 3).

Dengan demikian, strategi pengungkapan yang paling sesuai bagi perusahaan bukanlah strategi yang seragam untuk semua entitas, melainkan strategi yang proporsional terhadap kompleksitas usaha, kapasitas kepatuhan, dan profil pemangku kepentingannya masing-masing.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada kajian literatur dan belum didukung oleh data empiris dari laporan keuangan perusahaan secara langsung, sehingga simpulan yang dihasilkan bersifat konseptual.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

- Menguji secara empiris proposisi *trade-off* yang ditemukan dalam penelitian ini, misalnya apakah entitas berkompleksitas menengah benar-benar menunjukkan celah pengungkapan yang lebih lebar dibanding entitas berkompleksitas rendah atau tinggi.
- Mengkaji hubungan antara tingkat disclosure dengan variabel lain, seperti nilai perusahaan, biaya modal, atau reaksi pasar, untuk mengonfirmasi apakah *trade-off* yang diidentifikasi secara konseptual juga berdampak signifikan secara statistik.

Membandingkan praktik disclosure antarnegara dengan kerangka regulasi berbeda (misalnya PSAK vs IFRS), khususnya untuk melihat apakah beban pengawasan *fair disclosure* memang lebih berat bagi emiten kecil di berbagai yurisdiksi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abad, C., Barone, E., Gullkvist, B. M., Hellman, N., Marques, A., Marton, J., Mason, S. A., Da Silva, R. L. M., Morais, A., Gutiérrez, S. M., Quagli, A., & Vysotskaya, A. (2019). On the 'Disclosure Initiative – Principles of Disclosure': The EAA Financial Reporting Standards Committee's View. *Accounting in Europe*, 17(1), 1–32.
<https://doi.org/10.1080/17449480.2019.1664753>
- Al-Abd, S. A. A. J. (2025). The impact of accounting disclosure of financial reports under international standards on the efficiency of business sector companies: A theoretical study. *International Journal of Accounting and Management Sciences*, 4(1).
<https://doi.org/10.56830/ijamssi01202503>
- Aldredge, M., & Dubois, S. (2022). Back to the basics: Financial statement disclosures & reporting requirements. *International Journal of Business and Management*, 17(8), 1.
<https://doi.5539/ijbm.v17n8p1>
- Alshehadeh, A., Elrefae, G., Yaseen, S. G., Aljawarneh, N., & Al-Khawaja, H. (2024). Accounting

- data governance and its influence on financial report quality: Insights from commercial banks. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(4), 3222. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i4.3222>
- Azar, N., Zakaria, Z., & Sulaiman, N. A. (2019). The quality of accounting information: Relevance or value-relevance?. *Asian Journal of Accounting Perspectives*, 12(1). <https://doi.org/10.22452/ajap.vol12no1.1>
- Bischof, J., Gassen, J., Rohlfing-Bastian, A., Rostam-Afschar, D., & Sureth-Sloane, C. (2024). Accounting for transparency: a framework and three applications in tax, managerial, and financial accounting. *Schmalenbach Journal of Business Research*, 76, 573–611. <https://doi.org/10.1007/s41471-024-00200-7>
- Dreyer, F., Guest, N., Liang, Y., & Pierce, A. T. (2026). Systemic selective disclosure: The (un)fairness of regulation fair disclosure. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.6486639>
- Jaafar, S. B., Mohamed, M. A., & Ismail, M. S. (2023). Financial statements and external users' wealth related to decision-making. *International Journal of Business and Management*, 18(3), 1. <https://doi.org/10.26666/rmp.ijbm.2023.3.1>
- Karunananda, U., Azam, S., & Yusoff, S. (2025). A holistic model for measuring financial reporting quality in Sri Lanka. *International Journal of Management and Sustainability*, 14(4), 4649. <https://doi.org/10.18488/11.v14i4.4649>
- Youcef, B., Mohamed, Z., Abdellah, M., & Mourad, H. (2025). Study of the effectiveness of the quality of accounting information on accounting disclosure: An analytical study of a sample of private commercial enterprises in Algeria for the year 2023. *International Journal of Professional Business Review*, 10(1), e05273. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2025.v10i1.5273>
- Zhao, A. (2022). Research on information disclosure of notes to financial statements of listed companies. *BCP Business & Management*, 27, 1950. <https://doi.org/10.54691/bcpbm.v27i.1950>